



## Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Denpasar

**Penulis:**

I Ketut Aditya Teken<sup>1</sup>, Arina Romarina<sup>2</sup>

**Afiliasi:**

Pemerintah Provinsi Bali, Indonesia<sup>1</sup>

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat, Indonesia<sup>2</sup>

**Email:**

[adityat117@yahoo.com](mailto:adityat117@yahoo.com)<sup>1</sup>



©2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

DOI : <https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i2.4419>

**\*Penulis Korespondensi**

Nama: Arina Romarina

Afiliasi: IPDN Kampus Sumatera Barat

Email: [arina\\_romarina@ipdn.ac.id](mailto:arina_romarina@ipdn.ac.id)

Diterima: 11 Juni 2024

Direvisi: 20 November 2024

Publikasi Online: 23 Desember 2024

### Abstract

*This study aims to determine the effectiveness of SIPD in improving financial management performance in the Regional Finance and Asset Management Agency (BPKAD) of Denpasar City. This study used a qualitative method with a descriptive approach. Primary and secondary data were obtained through interviews, observations, documentation, and reports. The results of the study show that the application of SIPD in BPKAD Denpasar City has not been effective in improving the performance of regional financial management due to several factors, among which its application was only implemented in 2022 and requires an adaptation process for users, lack of integration with financial system data so that it requires a companion application of SIPKD for entrepreneurship, accounting, and reporting (AkLap), the system experiences frequent errors, slow application response, minimal training and socialization for users. The central government's response to the technical and operational problems faced by local governments was judged to be very slow. The study recommends enhancement of human resources capacity and competence through continuous training and socialization, data entry assistance, strengthening of communication and coordination among agencies and the central government, as well as the development of systems that are more user-friendly and integrated with other data and financial systems to become one single system sophisticated. Providing incentives and improving supporting infrastructure are critical to guarantee operational smoothness and minimize technical constraints that would hamper system performance.*

**Keywords:** SIPD, Effectiveness, performance, Local Financial Management

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan SIPD dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer dan sekunder diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD di BPKAD Kota Denpasar belum efektif dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya penerapannya baru dilaksanakan tahun 2022 dan membutuhkan proses adaptasi bagi pengguna, kurangnya integrasi dengan data sistem keuangan sehingga membutuhkan aplikasi pendamping SIPKD untuk penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan (AkLap), sistem sering mengalami *error*, lambatnya respon aplikasi, minimnya pelatihan dan sosialisasi bagi pengguna. Respon pemerintah pusat terhadap permasalahan teknis dan operasional yang dihadapi pemerintah daerah dinilai sangat lambat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan, asistensi pengisian data, penguatan komunikasi dan koordinasi antar instansi dan pemerintah pusat serta pengembangan sistem yang lebih *user-friendly* dan terintegrasi dengan data dan sistem keuangan lain sehingga menjadi *one single system* yang canggih. Pemberian insentif dan perbaikan infrastruktur penunjang sangat penting untuk menjamin kelancaran operasional dan meminimalisir kendala teknis

yang akan menghambat kinerja sistem.

**Kata kunci: SIPD, Efektivitas, Kinerja, Pengelolaan Keuangan Daerah**

## **PENDAHULUAN**

Pengelolaan keuangan daerah secara profesionalisme, handal, transparan dan akuntabel menjadi tanggung jawab dan tuntutan yang krusial pemerintah daerah di era desentralisasi fiskal saat ini (Sasmita et al., 2021; Tambingon et al., 2018). Pengelolaan keuangan daerah yang efektif merupakan kewajiban normatif berdasarkan aturan dan perundang-undangan dan menjadi pondasi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusi dan berkelanjutan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas didalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah (Herawati et al., 2016; Purba et al., 2021; Salain & Wedena, 2023). Untuk itu ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan terintegrasi sangat dibutuhkan agar perencanaan dan penganggaran yang dibuat semakin berkualitas.

Seiring dengan perkembangan jaman, pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengelolaan keuangan menjadi persyaratan penting dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan (Asa & Setyowati, n.d.; Andhayani & Eltivia, 2022). Pemerintah daerah memerlukan adanya suatu sistem informasi yang kuat, andal dan terpercaya agar dapat menyediakan informasi keuangan secara akurat, relevan dan tepat waktu atas pertanggungjawaban dalam mengelola anggaran publik (Manoe et al., 2023; Syairozi et al., 2021). Sistem informasi yang dibangun dengan tepat dapat menunjukkan gambaran kinerja organisasi yang akurat dan kredibel bagi para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan (Adisi & sadad, 2022). Kondisi ini mendorong pemerintah membangun suatu sistem untuk memantau dan mengevaluasi jalannya pemerintahan melalui kinerja pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang dikenal dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berta et al., 2023, 2023; Salindeho, 2021). Sistem ini dibentuk berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 274 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Petunjuk teknis pelaksanaannya diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.130/736/SJ tentang Percepatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Ketersediaan teknologi informasi akan mempermudah pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dengan kemudahan akses informasi dan data yang dibutuhkan yang digunakan para stakeholder sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan terkait ekonomi, sosial, politik dan lainnya (Kahar et al., 2022; Yuliusman et al., 2023; Tumija et al., 2023). Penerapan SIPD bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Wurangian et al., 2024). Sistem ini merupakan aplikasi berbasis online untuk memudahkan penyusunan proses penganggaran dan perencanaan dan menciptakan data yang efektif dalam menunjang kinerja pengelolaan keuangan daerah (Balqis et al., 2021). Kinerja ini dituntut dapat berjalan dengan baik sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggungjawab (M. I. Nasution & Nurwani, 2021) dan menopang pelayanan pada masing-masing instansi pemerintah agar lebih terstruktur dan terstandarisasi serta meningkatkan digitalisasi dalam dokumentasi laporan keuangan yang awalnya hanya lewat manual dan mempercepat proses input output data keuangan dan perencanaan (Putri et al., 2023)

Penerapan teknologi dan informasi secara tepat guna dan terintegrasi menjadi sangat krusial untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja sistem perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah (Syafik & Setiawan, 2023;), memperkuat pengawasan dan mempermudah pengendalian anggaran (Meliana, 2021; Salain & Wedena, 2023), proses pelaporan menjadi lebih cepat, akurat, transparan dan akuntabel sehingga informasi yang disajikan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Langkah ini akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel (Andhayani & Eltivia, 2022; Wahidah, 2022; M. Wisnu Pratommi et al., 2023; Christin Bakker et al., 2024). Penerapan SIPD memang cukup mampu membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran keuangan daerah. Berbagai penelitian mengenai SIPD telah dilakukan dengan beragam hasil temuan yang pada umumnya menemukan bahwa implementasi SIPD di berbagai lingkungan pemerintah daerah ternyata belum cukup efektif diterapkan

dan masih ditemukan berbagai kendala dan hambatan. Penelitian Wurangian et al., (2024) menemukan proses perencanaan dan penganggaran yang tidak efisien, utamanya fasilitas dan infrastruktur, mutasi pegawai dan kapasitas SDM yang terbatas menyebabkan penerapan SIPD pada Sekretariat Kabupaten Minahasa belum efektif. Hasil yang sama ditemukan pada penelitian Vitriana et al., (2022) yang menemukan bahwa penggunaan SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru masih diaplikasikan untuk tahapan penganggaran. Komunikasi yang tidak efektif dengan pemerintah pusat dan sosialisasi hanya melalui *online* menyebabkan keterbatasan dalam informasi dan petunjuk teknis penggunaan. Adaptasi sistem menjadi sulit dilakukan karena adanya perbedaan sistem yang digunakan oleh bidang anggaran dan akuntansi.

Penelitian Ekaputra (2021) tentang evaluasi kinerja SIPD terhadap penyusunan dokumen RKPD di pemerintah Kabupaten Nganjuk menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap aplikasi dan perubahan nomenklatur program kegiatan yang membingungkan pegawai dalam proses penyusunan RKPD. Untuk memastikan keselarasan antara RKPD dan RPJMD, proses penginputan program, penyusunan dokumen, dan kegiatan harus dioptimalkan. Penelitian Tumija et al., (2023) menemukan terdapat permasalahan pada penyusunan laporan realisasi anggaran. Hal ini disebabkan oleh menu untuk sistem Akuntansi dan Pelaporan (AkLap) tidak dapat diakses. Akibatnya hasil laporan menjadi tidak seimbang dan terjadi permasalahan saat proses rekonsiliasi Buku Besar kas Umum (LS kas Umum). Selain itu kondisi infrastruktur *server* yang tersedia belum memadai untuk menangani beban kerja SIPD sehingga sering menyebabkan *downtime* dan kinerja menjadi lambat. Hal senada ditemukan oleh Wahidah, (2022) yaitu keterbatasan pada sub-menu SIPD menyebabkan keterbatasan dalam penganggaran kebutuhan kabupaten tertentu. Perbedaan standar harga satuan pada menu SIPD dan harga aktual di lapangan mempersulit penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) pada UPT tertentu.

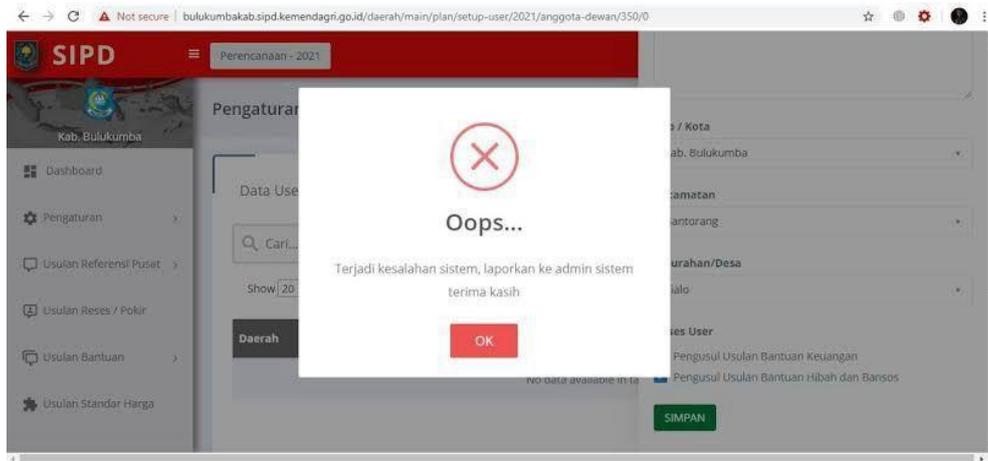
Hasil penelitian berbeda ditemukan oleh Manoe et al. (2023) yang menemukan bahwa penerapan SIPD pada bagian anggaran BPKAD Kabupaten Sikka sudah efektif dalam meningkatkan manajemen keuangan dan evaluasi pelayanan publik. Dewi et al., (2023) menyatakan secara simultan dan parsial implementasi SIPD berpengaruh dengan tingkat signifikansi 45% terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada sekretariat DPR Kota Cimahi. Salindeho (2021) menyatakan bahwa SIPD cukup efektif dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan perencanaan. Sistem ini memberikan kemudahan dalam input data, proses yang cepat dan tersajinya laporan keuangan yang tepat dan akurat namun kondisi *server* dan jaringan internet, kualitas operator masih menjadi hambatan. Selanjutnya, Andhayani & Eltivia, (2022) menemukan bahwa implementasi SIPD berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan transparansi keuangan daerah Kota Batu. Penelitian Wahidah (2022) juga menemukan bahwa SIPD berperan dalam mencegah terjadinya duplikasi anggaran, ketepatan alokasi anggaran dan memfasilitasi proses penganggaran dan perencanaan yang lebih terstruktur dan sistematis.

Kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia aparatur dan infrastruktur pendukung teknologi informasi sangat penting dalam optimalisasi tata kelola SIPD (Khaerullah et al., 2023). Untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yang dibuat melalui aplikasi SIPD efektif dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, sangat penting untuk mengoptimalkan kedua sumber daya ini (Asa & Setyowati, n.d.). Selain meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur TI yang memadai, hal ini juga mencakup peningkatan keterampilan SDM. SIPD dapat berfungsi sebagai alat yang dapat diandalkan untuk mendukung perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah jika dikelola dengan baik. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi akan meningkatkan keberhasilan dalam implementasi sistem dan akurasi pengelolaan data. Kurangnya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan karena proses penginputan data yang belum profesional (Fahzura & Najamudin, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Wulandary et al., (2023), Balqis et al., (2021) dan Fitrianiingsi et al., (2023) menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola dan operator menjadi faktor penting dalam optimalisasi penerapan SIPD dan meningkatkan kinerja manajemen keuangan daerah (Dewi et al., 2023). Pelatihan terkait SIPD dan Pendidikan pada bidang perencanaan dan akuntansi keuangan daerah harus dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Hal ini sangat krusial untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan pemahaman pengelola dan operator sehingga memudahkan mereka dalam proses input dan penyusunan laporan, perencanaan dan anggaran dan kinerja manajemen keuangan dapat terus ditingkatkan. Hasil ini diperkuat oleh penelitian Kofahe et al., (2019) tentang penerapan sistem informasi manajemen (GFMIS) pada sektor publik di Yordania yang menemukan bahwa kualitas sistem informasi dan layanan, resistensi pengguna, dan pengadaan pelatihan serta keterlibatan para

pengguna sistem menjadi faktor penentu keberhasilan penerapan GFMS dan akan memberikan manfaat yang signifikan.

Penerapan SIPD di BPKAD Kota Denpasar baru dilakukan tahun 2022 walaupun pemerintah sudah mensosialisasikannya sejak tahun 2019. Dasar pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pada Pasal 215 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki sebuah kewajiban untuk menggunakan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik pada bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam penerapannya selama ini berdasarkan informasi sementara melalui *interview* dengan Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kota Denpasar, disampaikan bahwa implementasi SIPD belum optimal dioperasionalkan karena sistem ini relatif masih baru dikelola dan belum sepenuhnya dapat dikuasai oleh seluruh ASN/PNS. Selain itu, *server* yang sering mengalami kendala teknis seperti *error* dan respon yang lamban ketika diakses turut menyulitkan penggunaan aplikasi. Selain kondisi *error system*, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan SIPD. Gambaran tentang kondisi *error* pada sistem aplikasi SIPD disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1. Kendala *Error* pada Aplikasi SIPD



Sumber: *helpdesk.sipd* (2024)

Hasil penelitian yang kontradiktif pada berbagai daerah dan didukung oleh informasi yang diperoleh mengenai operasional aplikasi SIPD saat ini, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama dengan penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui secara komprehensif bagaimana penerapan SIPD. Peneliti membuat hipotesa sementara yaitu diduga bahwa penerapan SIPD belum efektif mendukung kinerja pengelolaan keuangan dan perencanaan daerah. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi berbagai hambatan dan kendala serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan efektifitas dan performa SIPD dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Denpasar khususnya pada bidang dan bagian yang terkait dalam kegiatan perencanaan dan keuangan yang menggunakan langsung aplikasi ini.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif yang diarahkan untuk menganalisa dan mendeskripsikan persoalan suatu fenomena atau peristiwa, gejala, fakta ataupun kejadian secara sistematis, faktual dan akurat pada populasi atau daerah tertentu (Citriadin, 2020). Penelitian deskriptif yang digunakan adalah jenis penelitian survey dengan mengumpulkan segala informasi dan penggalan data secara mendalam dari suatu sampel dan menanyakannya melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) sehingga mendapatkan gambaran dari segala aspek populasi (Abu bakar, 2021) tentang penerapan SIPD di BPKAD Kota Denpasar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur Terdapat enam orang sebagai informan utama yang dipilih secara *purposive sampling* yang didasarkan pada orang yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel (A. F. Nasution, 2023). Informan dipilih berdasarkan peran strategis dan relevansi informan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dan diharapkan dapat memberikan data, informasi dan jawaban yang lebih komprehensif, antara lain: (I.1)

Kepala BPKAD Kota Denpasar, (I.2) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan; (I.3) Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan, (I.4) Kepala Bidang Perencanaan dan Anggaran; (I.5) Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan (I.6) Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan dan keuangan, artikel, buku, arsip, dan materi lain yang relevan dari BPKAD Kota Denpasar, baik melalui sumber *website* maupun di BPKAD langsung.

Teknis analisis data dilakukan dengan menerapkan model analisis interaktif (*interactive model analysis*). Menurut Miles dan Huberman (1994) dalam (Vitriana et al., 2022) teknik ini meliputi reduksi data, display data, dan verifikasi/pengambilan kesimpulan. Keabsahan data diperoleh melalui teknik triangulasi sumber dan diskusi teman sejawat untuk memperoleh kredibilitas data yang akurat dan objektif (Simangunsong, 2016).. Langkah yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan rumusan masalah yang ingin diteliti. peneliti menggunakan instrumen wawancara semi terstruktur dengan item pertanyaan terkait dengan variabel dan indikator yang telah ditetapkan pada operasional konsep agar informasi yang diberikan oleh informan dapat menjawab semua pertanyaan penelitian secara komprehensif dan valid. Selanjutnya, reduksi data dilakukan melalui simplifikasi data dengan transformasi seleksi yang ketat kemudian dilakukan pengelompokan dalam bentuk yang lebih luas untuk disajikan dan diintegrasikan menjadi informasi untuk dianalisis lebih lanjut untuk penarikan kesimpulan.

Konsep operasional merupakan uraian sistematis dari formula penelitian yang disusun untuk mendeskripsikan dan menerjemahkan konsep-konsep abstrak yang menjadi fokus penelitian ke dalam kerangka yang lebih sistematis, terukur dan spesifik, sehingga memberikan arahan yang jelas dalam pelaksanaan penelitian. Adapun konsep penelitian penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:"

**Tabel 1. Operasional Konsep Penelitian**

Teori	Variabel	Indikator	Kriteria Optimal	Inf
Teori Efektivitas Duncan dalam M. Steers (1985 :53)	1. Pencapaian Tujuan	1.1 Kurun Waktu Pencapaian	Proses yang cepat, adaptasi yang baik, target tercapai dan tepat waktu,	I.1, I.3, I.5, I.6
		1.2 Penyusunan Target dan Realisasi anggaran	Laporan realisasi anggaran tepat waktu, input realisasi anggaran sesuai dan akurat, penyusunan RKA tepat dan cepat	I.1, 1.2, I.3, I.5, I.6
		1.3 Dasar Hukum	Penerapan sistem sesuai dengan dasar hukum yang berlaku	I.1
		1.4 Strategi mencapai Tujuan	Peningkatan kapasitas SDM, pendampingan dan asistensi baik, sosialisasi dalam bentuk video, respon terhadap kendala cepat	I.1, 1.2, I.3, I.5, I.6
	2. Integrasi	2.1 Prosedur	Juklak dan junknis dalam bentuk video dan modul dapat dipahamii, kinerja lebih cepat, akuntansi dan laporan keuangan baik	I.4, I.6
		2.2 Analisis Perencanaan	Proses Perencanaan dan anggaran efisien, efektif dan tepat waktu, tidak menggunakan sistem pendamping	I.4, I.6
	3. Adaptasi	3.1 Sarana dan Prasarana	Ketersediaan perangkat keras dan lunak, konektivitas jaringan baik dan pemeliharaan rutin	I.4
		3.2 Monitoring Kesesuaian Program	Monitoring dan evaluasi secara berkala, rekonsilliasi baik, komunikasi dan koodinasi efektif antar OPD dan pemerintah pusat	I.1, I.3, I.4, I.5, I.6

*Sumber: Penulis (2024)*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Efektivitas Penerapan Aplikasi SIPD di Kota Denpasar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam mendukung kinerja Pengelolaan Keuangan Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Denpasar degan menggunakan Teori Efektivitas Duncan. Terdapat tiga variabel utama yang digunakan untuk mengukur efektivitas ini, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi (lihat tabel konsep operasional). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan I.1

selaku Kepala BPKAD tentang penerapan SIPD diperoleh jawaban sebagai berikut, sebagai berikut:

*“Walaupun SIPD sudah mulai diberlakukan pada tahun 2019 sesuai dengan Permendagri tentang tahun 2019, BPKAD baru menerapkannya tahun 2022. Namun sampai tahun 2023 SIPD masih menggunakan aplikasi pendamping SIPKD dan pada 2024 sudah harus digunakan secara tunggal. Pelaksanaan SIPD sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Banyak kendala teknis yang dihadapi seperti keterbatasan SDM, aplikasi sering mengalami error dan respon Pusdatin cenderung lambat dalam mengatasi kendala teknis. Walaupun ketersediaan prasarana perangkat keras sudah memadai namun konektivitas dan kualitas jaringan masih harus ditingkatkan untuk menghindari slow respon dan error sistem. Untuk meningkatkan kapasitas pegawai dilakukan sosialisasi dan pelatihan namun belum efektif meningkatkan keterampilan pegawai karena tidak dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Untuk memastikan kinerja perencanaan, keuangan dan pelaporan dapat berjalan dengan baik dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala per trwimulan. BPKAD juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak pusdatin agar mendapatkan asistensi dan pendampingan dalam penerapan SIPD dan BPKAD juga melakukan koordinasi antar instansi untuk rekonsilliasi dan sinkronisasi data perencanaan dan penganggaran”*

Untuk mendapatkan informasi terkait seluruh variabel dan indikator penelitian, seluruh informan yang dipilih diberikan pertanyaan yang sama, hal ini dilakukan sebagai langkah dalam mendapatkan kredibilitas informasi dengan melakukan pengecekan dan perbandingan jawaban atas pertanyaan yang sama dan mengkonfirmasi informasi yang diperoleh sebelumnya agar data dan informasi yang diterima benar, valid dan reliabel untuk digunakan. Adapun rangkuman hasil wawancara untuk setiap variabel dan indikator adalah sebagai berikut:

#### 1. Pencapaian Tujuan

Indikator yang digunakan adalah: 1) Kurun waktu pencapaian, 2) penyusunan target dan realisasi anggaran, 3) dasar hukum dan 4) strategi mencapai tujuan

##### A. Kurun waktu pencapaian,

SIPD di BPKAD Kota Denpasar baru diterapkan pada tahun 2022, meskipun secara nasional sistem ini telah diberlakukan sejak tahun 2019. Keterlambatan pengoperasionalan aplikasi ini menunjukkan bahwa sistem masih dalam tahap penyesuaian, yang mengakibatkan belum optimalnya penggunaan SIPD sebagai sistem tunggal dalam pengelolaan keuangan daerah. Selama tahun 2022-2023 penerapan SIPD masih menggunakan aplikasi pendamping SIPKD agar pelaporan keuangan dan pencairan keuangan tetap berjalan stabil. Penerapan penuh SIPD sebagai satu sistem baru dapat diterapkan pada tahun 2024 dan tentunya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi terutama bagi pegawai baru dan pegawai lama yang masih resisten dengan aplikasi yang baru sehingga akan berpengaruh pada proses input dan output data. Sebagai pengguna/*user* baru, para pegawai yang terlibat harus mampu beradaptasi terhadap sistem baru dan membutuhkan proses untuk menguasai setiap fitur dan operasional lainnya. Minimnya sosialisasi dan diklat menyebabkan terbatasnya kemampuan pengguna. Proses input data menjadi lebih lambat dan harus diintegrasikan dengan aplikasi lain membutuhkan tambahan waktu dalam penyelesaian pelaporan. Penerapan SIPD secara efektif baru sebatas tahapan perencanaan, sedangkan penatausahaan dan pelaporan akuntansi dan keuangan masih mengalami kendala teknis jika tidak didampingi oleh SIPKD.

Berdasarkan informasi ini dapat disimpulkan bahwa SIPD belum efektif meningkatkan kinerja dan proses pelaporan keuangan, penggunaan aplikasi pendamping menyebabkan tambahan waktu dan proses yang tidak efisien dalam penyusunan laporan karena harus melakukan sinkronisasi dan *check dan balance* data pada kedua sistem. Proses adaptasi memakan waktu sehingga kinerja SIPD menjadi tidak efektif karena para pengguna masih dalam proses pembelajaran untuk menguasai sistem.

##### B. Penyusunan target dan realisasi anggaran,

SIPD digunakan untuk mempercepat penyusunan RKA. Data RKA diperoleh melalui data realisasi anggaran yang terdapat pada SIPKD. Data target dan realisasi menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya. Untuk itu perlu ketelitian dan kecermatan dalam penguinputan data dengan dua sistem yang belum terintegrasi. Agar data yang dihasilkan lebih akurat. Kondisi ini menyebabkan penyusunan RKA tidak berjalan tepat waktu karena kinerja sistem yang belum optimal. Walaupun monitoring dan evaluasi terhadap target dan realisasi anggaran

dilakukan setiap triwulan namun belum efektif jika penyusunan laporan keuangan dan LRA masih menggunakan dua sistem yaitu SIPD dan SIPKD.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah, penggunaan dual sistem menyebabkan kinerja yang tidak efisien karena pengguna harus melakukan input ulang data ke SIPKD sehingga terjadi inkonsistensi, ketidakakurasian dan ketidakseimbangan data dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (lihat gambar 4). Ketidakselarasan ini mengindikasikan bahwa SIPD dan SIPKD harus diintegrasikan menjadi satu sistem yang dapat menghasilkan output yang akurat dan cepat. Untuk itu diperlukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja sistem agar tercipta sinkronisasi data perencanaan dan keuangan sehingga menghasilkan laporan yang akuntabel dan tepat waktu.

Gambar 4. Output dalam Penyusunan Anggaran Tidak Seimbang

Item Code	Description	Amount
13.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	25.250.000
1.1.01.06.01.0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	7.403.982
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	7.028.982
1.1.01.06.01.0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	7.403.982
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0
8.1.02.02.01.0001	Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.738.240
1.1.01.06.01.0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	6.359.750
8.1.02.01.01.0004	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Alat Tulis Kantor	5.984.790
1.1.01.06.01.0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0
3.1.02.03.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	6.359.750
8.1.02.01.01.0001	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Alat Listrik	4.649.280
1.1.01.06.01.0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0
3.1.02.03.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	4.434.280
8.1.02.01.01.0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0
3.1.02.03.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	4.171.000
8.1.02.01.01.0007	Beban Obat-Obatan/Obat	3.796.000
1.1.01.06.01.0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	4.171.000
8.1.02.03.02.0004	Beban Pemeliharaan Alat Kelektoran dan Kesehatan/Alat Kelektoran/Alat Kelektoran Umum	1.007.700
1.1.01.06.01.0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	633.700
8.1.02.03.02.0004	Beban Pemeliharaan Alat Besar/Alat-Bantu/Alat Pengolahan Air Kotor	375.000

Sumber: BPKAD Kota Denpasar, 2024

### C. Dasar hukum

Penerapan SIPD di BPKAD Kota Denpasar dilaksanakan sudah sesuai dengan dasar hukum dan ketentuan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 70 tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 130/736/SJ dan kepala daerah memberikan Instruksi melalui peraturan daerah untuk menerapkan SIPD pada seluruh OPD.

Dalam sudut dasar hukum, implementasi SIPD dapat dikatakan efektif karena sudah sesuai dengan intruksi pemerintah pusat melalui peraturan dan surat edaran agar seluruh pemerintah daerah di Indonesia menggunakan SIPD sebagai aplikasi standar yang digunakan untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

### D. Strategi mencapai tujuan

Pemerintah daerah berupaya agar SIPD dapat menjadi *single system* yang terintegrasi dengan sistem lainnya sebagai bentuk perwujudan visi “Denpasar Satu Data. Untuk mencapai efektifitas penerapan SIPD, BPKAD melakukan kegiatan sosialisasi melalui *video tutorial* yang disebarluaskan melalui *channel youtube*. Modul dan tutorial penggunaan SIPD wajib dipelajari oleh pegawai yang bertugas agar pengguna paham dan mahir menjalankan SIPD. Keseluruhan langkah ini belum menunjukkan hasil yang signifikan karena tidak didukung oleh bimbingan dan pelatihan teknis secara berkala sehingga kapasitas dan keterampilan pegawai masih terbatas, banyak pegawai yang masih bingung dan kesulitan dalam mengoperasikan sistem. BPKAD telah berupaya melaksanakan pendampingan/asistensi dengan memberikan tutorial terkait juklak dan juknis sesuai yang diberikan oleh pemerintah pusat namun respon pemerintah pusat yang cenderung lambat terkait kendala teknis mengakibatkan kinerja menjadi terhambat.

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan penerapan SIPD agar berjalan optimal (Tumija et al., 2023; Vitriana et al., 2022). Sosialisasi dan pelatihan yang minim dan tidak rutin terhadap pegawai BPKAD menjadi faktor penghambat utama dalam pencapaian tujuan SIPD. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sistem termasuk cara dan solusi untuk mengatasi kendala *error* dan *down system* mengakibatkan kinerja menjadi tidak optimal dan penginputan data serta pelaporan sering mengalami

kendala dan keterlambatan. Senada dengan temuan Balqis et al., (2021) yang menyatakan bahwa para pegawai hanya dibekali dengan sosialisasi yang singkat dan tidak diberikan diklat khusus mengenai SIPD dan penggunaannya bagi pemegang kendali aplikasi, akibatnya mengalami kendala dalam operasional SIPD. Berikut ini adalah dokumentasi sosialisasi SIPD yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk pegawai yang terlibat dalam penggunaan SIPD

**Gambar 2. Sosialisasi SIPD Kementerian Dalam Negeri**



Sumber: BPKAD Kota Denpasar, 2024

Meskipun serapan realisasi anggaran telah mencapai target, namun dalam proses penyusunan laporan keuangan yaitu penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan, aplikasi SIPD masih membutuhkan aplikasi pendamping yaitu aplikasi SIPKD. Artinya SIPD belum mampu sepenuhnya menjadi sistem Tunggal dan menggantikan sistem sebelumnya. Adisi & sadad, (2022) juga menemukan pada BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh SIPD, salah satunya adalah penyusunan SP2D dan laporan pengujian SP2D, aplikasi SIPD masih membutuhkan aplikasi pendamping yaitu SIMAKDA dan SIADINDA

## 2. Integrasi

Indikator yang digunakan adalah: 1) Prosedur dan 2) Analisis Perencanaan

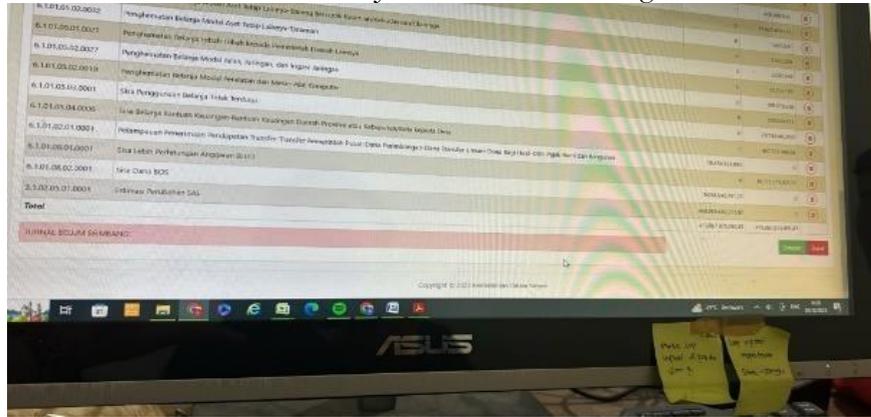
### A. Prosedur

Petunjuk penggunaan yang diberikan pemerintah pusat melalui video tutorial dari Ditjen Bina Keuangan daerah belum cukup meningkatkan kemampuan dan kemahiran pengguna sehingga penerapan SIPD belum berjalan efektif. Penggunaan aplikasi SIPD khususnya dalam pelaporan keuangan belum dapat terlaksana dengan baik, karena pada aplikasi SIPD sering mengalami *error* dan *slow respon*. Sistem SIPD belum terintegrasi sepenuhnya dengan data keuangan. Penerapan SIPD masih pada tahapan penatausahaan keuangan yaitu suatu pencatatan terhadap dokumen dalam pelaksanaan anggaran SKPD, pencatatan terhadap anggaran kas dan surat penyediaan dana, tata usaha pada kas di daerah, penatausahaan pendapatan, tata usaha belanja dan tata usaha dalam pembiayaan. Dalam penyusunan akuntansi dan laporan keuangan (AkLap) masih membutuhkan aplikasi SIPKD sebagai pendamping

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan SIPD di Kota Denpasar belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Kurangnya pelatihan dan instruksi teknis yang diberikan oleh pemerintah pusat menjadi salah satu kendala utama adalah salah satu kendala utama. Keterbatasan pelatihan ini berimplikasi pada kemampuan pegawai dalam mengoperasikan SIPD, yang seringkali mengalami kendala teknis seperti *error* pada sistem. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adisi & sadad, (2022) dan Balqis et al., (2021) yang menunjukkan bahwa Pendidikan dan pelatihan teknis khusus tentang aplikasi SIPD menjadi suatu keharusan bagi setiap pegawai yang menggunakannya. Penelitian tersebut menggarisbawahi bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam proses penggunaan aplikasi SIPD, yang hanya dapat diatasi melalui peningkatan kompetensi teknis para pengguna melalui pelatihan yang intensif dan berkesinambungan sebagai langkah esensial yang harus diambil untuk memastikan bahwa SIPD dapat dioperasikan dengan optimal, sehingga mampu mendukung peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah secara efektif. pemutakhiran Fitur-Fitur Operasional: SIPD harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan riil pengguna. Memberikan *update* fitur-fitur operasional yang relevan dengan tugas sehari-hari pengguna akan mengurangi masalah teknis dan meningkatkan kepuasan pengguna (Asa & Setyowati, n.d.). ketidakseimbangan data dalam sistem antara debit dan kredit menjadi salah satu

masalah yang dihadapi dalam operasional SIPD (lihat gambar 3). Saat input data keuangan dilakukan sering terjadi ketidakseimbangan dalam sistem aplikasi. Efeknya dapat mengganggu efisiensi kinerja karena harus ada tambahan waktu untuk melakukan akurasi data secara manual dan berdampak pada keterlambatan proses pelaporan keuangan.

Gambar 3. Jurnal Belum Seimbang



Sumber: BPKAD Kota Denpasar, 2024

### B. Analisis Perencanaan

Proses perencanaan sudah menggunakan SIPD mulai dari tahapan penyusunan KUA dan PPAS. Menu dan fitur perencanaan disajikan secara lengkap termasuk untuk menambah sub kegiatan. SIPD juga menyediakan berita acara kesepakatan yang sebelumnya dikerjakan secara manual. SIPD efektif digunakan dalam proses perencanaan tanpa membutuhkan aplikasi pendamping, namun terdapat kendala non teknis yaitu Resistensi pegawai terhadap teknologi baru cenderung tinggi, pegawai lebih memilih menggunakan aplikasi yang lama untuk menunjang kinerjanya.

Dari informasi diatas disimpulkan bahwa SIPD efektif mendukung proses perencanaan. Namun resistensi pegawai terhadap penggunaan teknologi baru ternyata masih tinggi. Budaya pegawai yang enggan menggunakan teknologi seperti ini memang ditemui pada hampir diseluruh pemerintah daerah sehingga dibutuhkan komitmen bersama dengan memephatikan infrastruktur pendukung agar pegawai tertarik untuk menggunakannya (Khaerullah et al., 2023)

## 3. Adaptasi

### A. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana dan sumberdaya manusia merupakan faktor penting dalam tata kelola SIPD agar dapat proses penyusunan perencanaan dapat berjalan efektif dan efisien ((Asa & Setyowati, n.d.)

Berdasarkan hasil rangkuman wawancara dengan beberapa responden diperoleh informasi sebagai berikut

“Ketersediaan infrastuktur pendukung untuk SIPD dan keuangan sudah sangat memadai. Jumlah unit komputer untuk operasional SIPD dan keuangan tersedia lengkap seluruh bagian dan sub-bagian. Untuk operasional SIPD tidak memerlukan spesifikasi komputer yang paling canggih karena SIPD merupakan aplikasi berbasis *website* yang membutuhkan konektivitas dan jaringan internet yang sangat tinggi.”

### B. Monitoring kesesuaian Program

BPKAD melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan rekonsiliasi secara berkala/setiap bulan dengan OPD lainnya. Rekonsiliasi dilakukan dengan pengecekan (*check and balance*) data keuangan antar OPD untuk tujuan sinkronisasi dan akurasi data serta menyesuaikan antara anggaran dan realisasi. Monev dan Rekonsiliasi dilakukan untuk mengintegrasikan data keuangan antara SIPD dan SIPKD, sehingga data yang ada pada SIPD sesuai dengan data pada SIPKD. Penyesuaian program dan kegiatan dengan anggaran memerlukan SIPKD sebagai aplikasi pendamping agar pertanggungjawaban laporan keuangan yang dihasilkan menjadi baik dan akuntabel

## Upaya BPKAD dalam meningkatkan efektifitas penerapan SIPD.

Berdasarkan informasi dan fakta yang ditemukan dilapangan, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan penerapan SIPD di BPKAD Kota Denpasar belum efektif. Semua kendala ini menjadi sangat krusial untuk diperhatikan agar penerapan SIPD dapat berjalan lebih optimal untuk proses perencanaan penganggaran dan administrasi yang efisien dalam pembangunan daerah (Setyawan et al., 2022). Secara umum, faktor-faktor penghambat tersebut antara lain:

1. Durasi penggunaan aplikasi masih baru yaitu tahun 2022. SIPD belum mampu berfungsi sebagai sistem tunggal untuk pelaporan keuangan sehingga masih dibutuhkan aplikasi pendukung untuk meningkatkan performanya.
2. Kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk pengetahuan, keahlian dan keterampilan dalam menggunakan SIPD masih terbatas karena minimnya sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendidikan yang diberikan
3. Resitensi pegawai dan tingkat literasi digital yang rendah menyebabkan pengguna akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem baru
4. kurang efektifnya koordinasi dan komunikasi dengan Pusat sehingga pemerintah pusat cenderung lambat dalam merespon dan memebrikan solusi atas kendala yang dihadapi pemerintah daerah sehingga menyebabkan penanganan masalah menjadi lambat dan tidak efektif
5. Penggunaan SIPD mendukung kinerja perencanaan dengan menyajikan fitur perncaan yang sudah lengkap. Namun sistem ini belum efektif pada pengelolaan keuangan. Dalam penyusunan Akuntansi dan Pelaporan (Aklap) keuangan dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), fitur yang ada di SIPD belum mampu menghasilkan catatan yang seimbang (*balance*), sehingga masih banyak kesalahan dalam sistem yang mempengaruhi akurasi laporan keuangan. Untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi ini masih memerlukan aplikasi pendamping seperti SIPKD.
6. Masalah Teknis pada Sistem yaitu kendala konektivitas dan jaringan, proses penginputan data sering mengalami *error* dan *downtime* terutama saat terjadi input data secara bersama serta respon yang lambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas *server* belum optimal dan perlu peningkatan kapasitas dan pemuktahiran sistem.

Untuk mengatasi segala kendala dan hambatan baik teknis dan non teknis, pihak BPKAD Kota Denpasar telah melakukan berbagai langkah positif untuk untuk meningkatkan efektivitas penerapan aplikasi SIPD, beberapa langkah telah tersebut antara lain:

#### *Upaya langsung*

Upaya secara langsung dilakukan secara internal dan eksternal. *Tindakan internal* dilakukan berfokus pada peningkatan kapasitas sumberdaya dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dan keterampilan pengguna/*user* dalam pengoperasian SIPD dengan melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendidikan bagi pelaksana dan operator. Sedangkan *Tindakan eksternal* dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah teknis yang muncul selama implementasi SIPD. BPKAD juga melakukan upaya dengan menjalin komuniaksi yang efektif antar instansi dan antar pemerintah. Komunikasi menjadi sarana bagi para instansi untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama (M. I. Nasution & Nurwani, 2021). Selain itu BPKAD juga berusaha meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri, pemerintah Provinsi dan anar instansi dalam lingkup Kota Denpasar. Langkah ini dilakukan dengan tujuan menciptakan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat agar mampu mengatasi persoalan teknis dan non teknis yang dihadapi dalam implementasi SIPD.

#### *Upaya tidak langsung*

Upaya tidak langsung internal dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan dalam penggunaan aplikasi, dalam hal ini BPKAD Kota Denpasar menggunakan modul dan video tutorial tentang penatausahaan dan akuntansi laporan. Meskipun keterbatasan sumber daya manusia, upaya untuk memperbaiki dan menyebarkan informasi tersebut ke perangkat daerah terus dilakukan. Sedangkan Tindakan secara eksternal dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendagri untuk mengembangkan dan memperbaiki masalah sistem yang dihadapi. Langkah ini merupakan cara untuk mengatasi hambatan eksternal yang mengganggu optimalisasi SIPD.

### **KESIMPULAN**

Penerapan SIPD pada berbagai instansi pemerintah daerah menghasilkan kesimpulan yang positif dan juga negatif. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa penerapan SIPD signifikan berpengaruh positif dan efektif dalam mendukung kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Sejumlah manfaat dirasakan antara lain proses input data yang lebih cepat dan mudah, estimasi anggaran yang lebih tepat dan akurat, efektifitas dan efisiensi biaya dan waktu, mencegah terjadinya penyelewengan dan meminimalisir perilaku oportunistik dan *moral hazard* dalam perencanaan dan penganggaran, serta menghasilkan laporan yang akuntabel dan dapat diandalkan bagi pimpinan dalam pembuatan keputusan dan kebijakan. Namun, hasil penelitian yang kontradiktif juga ditemukan bahwa SIPD belum efektif diterapkan oleh beberapa OPD karena adanyakendala teknis maupun non teknis yang harus dihadapi pemerintah daerah. Oleh karena itu Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi, pembenahan dan perbaikan untuk kesempurnaan sistem agar lebih efektif digunakan dalam menunjang kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini menemukan hasil yang hampir sama dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan dugaan atau hipotesis awal dapat dibuktikan bahwa bahwa penerapan SIPD belum efektif mendukung kinerja pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kota Denpasar namun SIPD cukup efektif dalam menunjang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Beberapa kendala ditemukan antara lain. SIPD belum mampu berfungsi sebagai sistem tunggal untuk pelaporan keuangan sehingga masih dibutuhkan aplikasi pendukung untuk meningkatkan performanya, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, resitensi pegawai dan tingkat literasi digital yang rendah, kurang efektifnya koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat, SIPD masih terbatas untuk penatасusahaan keuangan, penyusunan akuntansi dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta permasalahan teknis pada Sistem yaitu konektivitas dan kualitas jaringan, proses input data sering mengalami *error* dan *downtime* yang menunjukkan bahwa kapasitas *server* belum optimal dan perlu peningkatan kapasitas dan pemuktahiran sistem.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan SIPD di BPKAD Kota Denpasar diperlukan perbaikan sistem SIPD secara komprehensif untuk mengurangi error, mempercepat respon, dan memastikan bahwa SIPD dapat berfungsi sebagai sistem tunggal dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah pusat melalui Kemendagri perlu secara rutin menyelenggarakan pelatihan khusus SIPD dan sosialisasi bagi para pegawai khususnya pengelola SIPD di BPKAD Kota Denpasar. Ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang memadai dan dapat mengoperasikan SIPD dengan baik. Peningkatan infrastruktur teknologi, termasuk peningkatan kualitas jaringan dan server, sangat dibutuhkan untuk mendukung operasional SIPD yang lancar dan efisien. Pendampingan berkelanjutan dari pemerintah pusat serta monitoring berkala perlu dilakukan untuk mengevaluasi dan mengatasi permasalahan yang muncul dalam penerapan SIPD. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan solusi tepat waktu terhadap kendala yang dihadapi. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan terutama dalam segi jumlah responden yang masih diambil dari level pimpinan bukan pelaksana, sehingga jawaban yang diberikan belum sepenuhnya menjawab pertanyaan penelitian terutama bagian teknis dan operasional aplikasi. Disarankan pada penelitian berikutnya dapat menambah jumlah informan termasuk level pelaksana atau staf yang terlibat langsung dengan SIPD. Penelitian berikutnya juga perlu melakukan studi komparatif dengan unit kerja yang berbeda dalam satu lingkungan pemerintah daerah sehingga persoalan secara spesifik pada setiap instansi dapat dieksplorasi lebih dalam dalam lagi.

## **REFERENSI**

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga Jl.
- Adisi, C. A., & sadad, A. (2022). Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 150–164. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i2.581>
- Andhayani, A., & Eltivia, N. (2022). The Effect of Implementation of the Regional Government Information System (SIPD) on Regional Financial Transparency in Local Governments. *Judicious*, 3(2), 364–369. <https://doi.org/10.37010/jdc.v3i2.1162>
- Asa, R. A., & Setyowati, E. wike. (n.d.). Tata Kelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu). *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (JAP)*, 5(4), 346–352.

- Balqis, N., Fadhly, Z., & Az, M. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wabana Bhakti Praja*, 11(1), 146–161. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1953>
- Berta, P. M. A., Bahri, S., & PP, H. (2023). The Effectiveness Of The Application Of Local Government Information System (SIPD) In The Coordinating Board For Regional Government And Development Iii Of East Java Province In Malang. *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)*, 3(1), 156–166. <https://doi.org/10.31328/cebi.v3i1.336>
- Christin Bakker, C., Parawiyati, P., & Pangastuti, D. A. (2024). The Effects of Information Systems and the Utilization of Information Technology on the Quality of Financial Reports with Internal Control as Moderation. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 07(01), 476–482. <https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i1-50>
- Citriadin, Y. (2020). Metode penelitian kualitatif (suatu pendekatan dasar). In Lubna (Ed.), *Sanabil Creative*. Sanabil. [http://www.academia.edu/download/35360663/Metode\\_Penelitian\\_Kualitatif.docx](http://www.academia.edu/download/35360663/Metode_Penelitian_Kualitatif.docx)
- Dewi, M., Sumiati, N., & Suryaman, W. (2023). Pengaruh Implementasi SIPD Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(2), 621–624. <https://doi.org/10.37676/professional.v10i2.4500>
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 3(2), 6.
- Fahzura, L., & Najamudin, N. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Social and Policy Issues*, 1, 7–13. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i1.33>
- Fitrianiingsi, N., Santoso, B., & Pituringsih, E. (2023). Effectiveness of Regional Financial Management With the Regional Government Information System (Sipd) As the Intervening Variable. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 144(12), 93–103. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2023-12.11>
- Herawati, E., Malisan, L., & Kusumawardani, A. (2016). Pengaruh sumber daya manusia bidang akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 1(1), 12–19. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/issue/view/55>
- Kahar, K., Majid, J., & Fadhilatunisa, D. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 3(1), 54–64. <https://doi.org/10.24252/isafir.v3i1.29115>
- Khaerullah, Parawu, H. E., & Tahir, N. (2023). Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang dan Kekayaan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. *Jurnal Unismuh*, 4(2), 1–14. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/download/11381/6212>
- Kofahe, M. K., Hassan, H., & Mohamad, R. (2019). Factors Affecting Successful Implementation of Government Financial Management Information System (Gfmis) in Jordan Public Sector: a Proposed Framework. *International Journal of Accounting, Finance and Business (IJAFB)*, 4(20), 32–44. [www.ijafb.com](http://www.ijafb.com)
- M. Wisnu Pratommi, Muhsyaf, S. A., & Isnawati. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(4), 99–109. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i4.955>
- Manoe, D. S., Koten, Y., & Rozady, M. P. N. (2023). Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Sitem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Sikka. *Jurnal in Create (Inovasi Dan Kreasi Dalam Teknologi Informasi)*, 9(1), 19–26.
- Meliana, M. (2021). Utilization of Information Technology and Organizational Commitment to the Reliability of Financial Statements with Internal Control Moderation. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 4(1), 38–44. <https://doi.org/10.37888/bjra.v4i1.262>
- Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). CV. Harva Creative. [http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku metode penelitian kualitatif.Abdul Fattah.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku%20metode%20penelitian%20kualitatif.Abdul%20Fattah.pdf)
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Purba, S., Nainggolan, A., & Tarigan, S. Y. B. (2021). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Karo). *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 20(2), 113–120. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v20i2.136>

- Putri, A. M., Suriyanti, L. H., & Hastanto, A. M. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ekobistek*, 12(1), 486–494.  
<https://doi.org/10.35134/ekobistek.v12i1.500>
- Salain, P. P. P., & Wedena, I. K. J. (2023). Penerapan Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) Dalam Pelaksanaan Laporan Keuangan Di UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 453–458.
- Salindeho, A. (2021). The Role of Regional Government Information System (SIPD) on the Sub-District of Aertembaga's Financial Accountability. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 1(3), 150–153.  
<https://doi.org/10.55324/ijoms.v1i3.26>
- Sasmita, D. A., Nasrizal, N., & Rasuli, M. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 118–129. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.28>
- Setyawan, A., Toha, A., & Suryawati, D. (2022). The Implementation of Regional Development Plan through Regional Government Information System in Jember Regency. *Regional Dynamic: Journal of ...*, 2(1), 65–72.  
<https://doi.org/10.19184/rjpbs.v2i1>
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Syafik, M., & Setiawan, D. (2023). Determinants Factors Affecting Quality of Financial Statement Information: External Factors as Moderating Variables. *Jurnal Economia*, 19(2), 141–157.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.21831/economia.v19i2.46788>
- Syairozi, M. I., Pambudy, A. P., & Yaskun, M. (2021). Analisis Penerapan Good Governance Dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian 2021*, 1(1 SE-Articles), 978–623.
- Tambingon, H. N., Yadiati, W., & Kewo, C. L. (2018). International Journal of Economics and Financial Issues Determinant Factors Influencing the Quality of Financial Reporting Local Government in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(2), 262–268. <http://www.econjournals.com>
- Tumija, Hendra, A., & Dkk. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( SIPD ) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah ( Siagian , n . d . ). Manusia telah mengembangkan peningkatan teknologi ya. *Jurnal Media Birokrasi*, 5(1), 79–91.
- Vitriana, N., Agustiawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal*, 1(1), 64. <https://doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947>
- Wahidah, W. (2022). Implementation of the Use of Local Government Information Systems (SIPD) in Improving the Effectiveness of the Budget of education technical implementation unit. *Proceedings*, 3(1), 2–10. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/iconiss>
- Wulandary, A. R., Effendy, L., & Jumaidi, L. T. (2023). Pengaruh Penguasaan TI dan SIPD Terhadap Efektivitas Penyusunan RKA pada OPD Kota Mataram. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 1(2), 235–242. <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.986>
- Wurangian, A., Wawointana, T., & Fitri H Mamonto. (2024). Financial Administration of Information Systems Regional Government at The Regional Secretariat of Minahasa Regency. *Technium Social Sciences Journal*, 53(1), 31–42.
- Yuliusman, Wahyu, G., & Zulma, M. (2023). Determinants of Local Government Financial Reporting Quality: Evidence from Jambi, Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting*, 14(4), 9–16.  
<https://doi.org/10.7176/rjfa/14-4-02>